

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI INDEPENDENSI
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD SAFRAN
NPM : 1974201001391

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI INDEPENDENSI
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD SAFRAN
NPM : 1974201001391**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : Juni 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI INDEPENDENSI
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD SAFRAN
NPM : 1974201001391

Telah dipertahakan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Susunan Dewan penguji

Ketua Penguji,



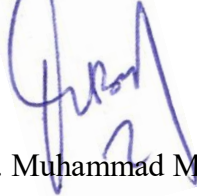
Yudhia Ismail, S.H.MHum

Anggota Dewan Penguji

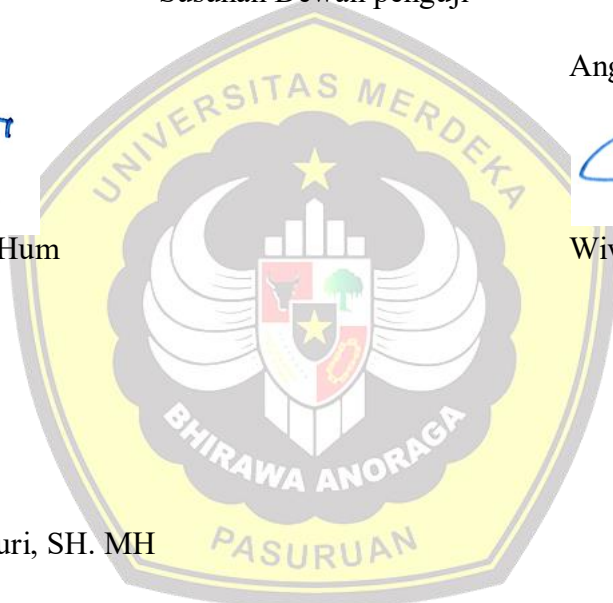


Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji



Dr. Muhammad Mashuri, SH. MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H.MHum

ABSTRAK

Peranan Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja anggota Dewan, dengan tujuan untuk memastikan kedisiplinan serta kepatuhan norma, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPRD. Tugas ini sangat penting untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, etika, serta kredibilitas DPRD. Akan tetapi BK DPRD saat ini diragukan independensinya dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan terjadinya konflik kepentingan terhadap anggota BK dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Dari isu tersebut, dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Urgensi independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta bagaimana mekanisme penegakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung aturan serta dasar hukum terhadap penanganan yang dilakukan oleh BK DPRD dalam penanganan perkara pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil penelitian, BK DPRD dalam menangani pelanggaran oleh anggota DPRD haruslah dilakukan secara profesional. Urgensi independensi BK DPRD tersebut mengharuskan perlunya perubahan mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Keterlibat pihak luar dalam penanganan perkara di BK DPRD sangatlah diperlukan guna menjaga integritas BK DPRD yang selama ini banyak mendapatkan stigma negatif dikarenakan pelanggar terhadap kode etik adalah teman sejawat yang sama sama berasal dari anggota DPRD dan mungkin juga berasal dari partai politik yang sama.

Mekanisme penanganan perkara di BK mengacu kepada Peraturan DPRD sebagaimana yang diterapkan oleh DPRD Jawa Barat, mekanisme penegakan kode etik dimulai dari Pengaduan dan Tata cara pengaduan, Pelanggaran Tanpa Pengaduan, Penyelidikan, Pemeriksaan, Persidangan, Tata tertib Persidangan, Acara Persidangan Tanpa Kehadiran terperiksa, Pengambilan Keputusan, Keputusan, Tata Cara Penjatuhan Sanksi, Rehabilitasi, Peubahan tata Beracara Badan Kehormatan.

Kata Kunci : Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasuruan, Juni 2025

Mahasiswa,



MUHAMMAD SAFRAN
NPM : 1974201001391

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Mengenai Independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. sekaligus sebagai ketua penguji.
3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan perbaikan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.

6. Keluarga dan kerabat juga orang-orang terdekat yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya untukku serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2019/2020 yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, Juni 2025

Penulis



MUHAMMAD SAFRAN
NPM : 1974201001391

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	2
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	3
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
2. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	14
3. Tugas dan wewang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18
4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23
2. Keanggotaan dan tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30
3. Regulasi penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32
4. Jenis sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
C. Tinjauan Umum Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Pengertian Kode etik	35
2. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38
3. Tujuan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39

4. Kode etik sebagai produk hukum.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	45
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI INDEPENDENSI BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
A. Urgensi independensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	51
B. Mekanisme Penegakan Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	65
BAB V : METODE PENELITIAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR BAGAN

Alur Proses Pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... 68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

